

Pertimbangkan Lagi Pelibatan Institusi Negara

KOMPAS - 3/1/19.

KPU meminta unsur pimpinan KPK dan Komnas HAM menjadi panelis pada debat calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019. Namun, hal ini dianggap tidak tepat.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum diminta mempertimbangkan lagi keputusannya untuk melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai panelis dalam debat perdana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019. Hal ini perlu dilakukan agar dua institusi negara itu tidak tertarik dalam kancah persaingan politik.

Sementara itu, debat pertama capres dan cawapres akan berlangsung pada 17 Januari 2019 dengan tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. KPU, berdasarkan kesepakatan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menetapkan delapan orang sebagai panelis, termasuk unsur pimpinan Komnas HAM dan unsur pimpinan KPK.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, Rabu (2/1/2019), di Jakarta, mengatakan, ada sejumlah hal mengapa pelibatan KPK dan Komnas HAM seyogianya tak dilakukan, yakni soal independensi serta posisi kedua lembaga itu sebagai institusi yang berkaitan dengan penegakan hukum. Menurut dia, tidak pada tempatnya lembaga yang berhubungan dengan penegakan hukum dibawa pada ranah pertarungan politik.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini juga berharap KPU mempertimbangkan ulang keputusan tersebut. Sebab, dia khawatir

hal ini bisa menimbulkan masalah terkait dengan dua institusi hukum itu. Sebab, pelibatan ini bisa dilihat seolah menarik institusi yang independen ke kancah politik. "Setidaknya bisa muncul stigma di mata publik soal netralitas dan sikap non-partisan dua lembaga ini jika para pendukung memolitisasi adanya kecenderungan keberpihakan dari pertanyaan yang muncul," kata Titi.

Menanggapi pandangan dari kelompok masyarakat sipil tersebut, Ketua KPU Arief Budiman, di Gedung KPU, Jakarta, menyampaikan tidak ada masalah dengan keberatan itu. Arief menyampaikan semua orang boleh setuju atau boleh tidak setuju dengan keputusan KPU.

Hanya saja, terkait gugatan mengenai independensi, Arief meyakini anggota lembaga-lembaga yang direncanakan turut menjadi panelis debat tetap bisa menjaga independensi mereka. "KPK saya yakin independen," kata Arief.

Senada dengan Arief Budiman, Deputy Direktur Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar menilai pelibatan KPK dan Komnas HAM bisa dilihat sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan pandangan yang relevan terkait isu korupsi dan HAM. "Setidaknya masalah HAM dan anti-korupsi terakomodasi dalam debat itu," kata Erwin.

Dia menilai keraguan mengenai independensi bisa ditangkis dari adanya persetujuan dari kedua pasangan calon untuk melibatkan unsur pimpinan kedua lembaga itu.

KPK menolak

KPK menyatakan tidak akan

berpartisipasi sebagai panelis dalam debat capres dan cawapres. Meski tema yang diusung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPK, lembaga antirasuah tersebut enggan masuk dalam ranah politik, termasuk proses pemilu.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan, KPK merupakan penegak hukum sehingga urusan pemilu yang berkaitan dengan prosedur debat dan lain-lain bukan merupakan ranah dan kewajiban KPK.

"KPK tentu saja menghargai permintaan KPU tersebut yang kami pandang menunjukkan *concern* KPU terhadap aspek antikorupsi," ujar Syarif.

Persiapan debat

Jelang debat, pasangan capres dan cawapres mulai bersiap dengan membentuk tim khusus yang melibatkan tokoh dari partai politik pengusung calon dan tokoh dari luar partai politik.

Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan, TKN telah membentuk tim khusus untuk menyiapkan konten yang akan dipaparkan paslon saat debat. Begitu pula konten untuk menangkis "serangan" dari paslon lain. Tak hanya itu, sejumlah tokoh sering berdiskusi dengan Jokowi ataupun Ma'ruf untuk memberikan masukan.

Sementara itu, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Prabowo dan Sandi juga intens berdiskusi dan menerima masukan dari berbagai pihak, baik dari partai pengusung maupun dari luar partai, agar lebih siap menghadapi debat.

(INK/IAN/MTK)